



13 Mei 2022

Laporan Kegiatan

Project-Based Training: Data Analytic for Audit

Analisis Terkait Gambaran
Kebermanfaatan Kartu Sembako Dalam
Mengurangi Beban Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga



Ardhi Kurniawan

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. GAMBARAN UMUM TOPIK PENGAWASAN

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Desa sebagai bagian dari pemerintah perlu dilakukan pengawasan, utamanya terkait besarnya dan beragamnya dana yang dikelola.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako. Sehingga indeks bantuan yang semula Rp 110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp 150.000/KPM/Bulan, dan ujungnya pada bulan Maret 2020 indeks indeks bantuan program sembako kembali dinaikan menjadi Rp200.000/KPM/Bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan stunting. Pada tahun 2021, target KPM program sembako secara nasional adalah 18,8 juta KPM setiap bulan dengan anggaran total sebesar Rp45,12 triliun.

Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2022 memetakan 7 sektor, 29 tema dan 99 topik strategis keuangan negara dan pembangunan nasional yang menjadi fokus pengawasan BPKP Tahun 2022. Topik Pengawasan yang diambil pada kegiatan analisis data ini adalah Penurunan Beban Pengeluaran – Kartu Sembako, yang termasuk dalam Sektor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Tema Penurunan Beban Pengeluaran. Informasi minimal yang diharapkan mampu dihasilkan dari topik ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Kebermanfaatan Kartu Sembako dalam mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah;
2. Analisis hambatan dan Kebermanfaatan Kartu Sembako; dan
3. Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas kartu sembako.

B. IDENTITAS OBYEK PENGAWASAN

Dalam pengawasan terkait program bantuan sosial sembako di Kota Tarakan, tanggung jawab program di ampu oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam melaksanakan program ini, Dinas Sosial dibantu oleh tenaga sosial yang terdiri dari 1 Koordinator Daerah (Korda) Kota Tarakan, 4 TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan 22 TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) agar program Bantuan Sosial Program Sembako terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

C. MATRIKS DESAIN PENGAWASAN

Unit Rendal : Direktorat Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Bencana
 Topik : Penurunan Beban Pengeluaran Melalui Kartu Sembako
 Tujuan Pengawasan : Memberi keyakinan atas pemnafaatan bantuan sosial kartu sembako dalam mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah tangga dan menilai efektivitas kartu sembako

MATRIK DESAIN PENGAWASAN

No	Insilwas yang Diharapkan	Pertanyaan Audit	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Keterbatasan/ Risiko	Antisipasi Risiko	Prakiraan Hasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Gambaran kebermanfaatan Kartu Sembako dalam mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah tangga	1. Apakah penerima bantuan sembako pada program penurunan kemiskinan ekstrem telah sesuai dengan kriteria? 2. Apakah terdapat juknis atau pedoman umum penyaluran bansos sembako untuk program penurunan kemiskinan ekstrem? 3. Apakah penerima bansos sembako telah tepat sasaran; 4. Apakah bansos sembako telah disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas? 5. Apakah KPM pada program penurunan kemiskinan ekstrem telah bertransaksi di e warong dan menerima bahan pangan sesuai dengan ketentuan? 6. Apakah e warong telah menyediakan bahan pangan sesuai dengan juknis/pedoman?	1. Inpres Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem; 2. Juknis program penurunan kemiskinan ekstrem; 3. Perdirjen PFM tahun 2021/ Pedoman umum kartu sembako tahun 2021;	1. Kriteria penerima bansos program penurunan kemiskinan ekstrem dari Inpres penurunan kemiskinan ekstrem; 2. Mekanisme penyaluran dan tata kelola program bansos sembako pada program penurunan kemiskinan ekstrem yang diatur dalam juknis program kemiskinan ekstrem, Perditjen PFM tentang bansos sembako atau perditjen tentang program kemiskinan ekstrem; 3. DTKS dan data bayar/SI penerima bansos sembako /bulan, data perbankan (distribusi KKS, daftar e Warong, data gagal/berhasil top-up, data transaksi KPM di e warong) bersumber dari Kemensos (Pusdatin, Ditjen PFM, JSK), Himbara dan PT Pos Indonesia, data e warong; 4. Hasil kuesioner pada KPM yang diuji sampling dari perwakilan. 5. Data umum sosial ekonomi pada Kab/Kota yang ditetapkan dalam program kemiskinan ekstrem, bersumber BPS ; 6. Hasil survey BPS pada Maret 2022	1. Dokumen reviu 2. interview/wawancara	analisis deskriptif	keterbatasan sarana dan sdm dalam pengolahan data DTKS	bekerjasama dengan investigasi dalam pengolahan data DTKS	Sesuai hasil cleansing data, akan diperoleh informasi: 1. calon KPM tepat sasaran dan dengan data valid; 2. KKS yang telah dan belum terdistribusi; 3. jumlah agregat KPM yang sudah transaksi dan belum transaksi; 4. penyimpulan berdasar kuesioner secara uji petik, tentang pemanfaatan bansos sembako.

2	Analisis Hambatan Kebermanfaatan Kartu Sembako	<p>1. Apakah bantuan sembako telah diterima oleh KPM sesuai dengan data bayar secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas?</p> <p>2. Apakah terdapat hambatan penyaluran oleh Himbara atau PT Pos, dalam hal distribusi KKS atau top up ke rekening KPM?</p> <p>3. Apakah terdapat KPM yang mengalami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saldo nol - Pin terblokir/KKS hilang, rusak - masalah aktivasi <p>4. Apakah KPM dapat langsung bertransaksi di ewarong;</p> <p>5. Apakah e Warong telah menyediakan bahan pangan setiap saat, apabila KPM akan bertransaksi untuk membeli bahan pangan?</p>	<p>1. Inpres Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem;</p> <p>2. Juknis program penurunan kemiskinan ekstrem;</p> <p>3. Perdirjen PFM tahun 2021/ Pedoman umum kartu sembako tahun 2021;</p> <p>4. PKS dengan Himbara dan PT Pos</p>	<p>1. Data bayar (BNBA)/bulan</p> <p>2. Data perbankan tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> - KKS telah/tidak terdistribusi dan penjelasan KKS tidak terdistribusi; - Gagal top up ke rekening KPM dan penjelasannya; - KPM dengan masalah saldo nol, pin terblokir, KKS hilang/rusak; masalah aktivasi dan tindak lanjut penyelesaian masalah oleh perbankan; - KPM yang telah/belum transaksi; <p>3. Nama2 e warong;</p> <p>4. Data dari e wrong mengenai bahan pangan yang dijual;</p> <p>5. Data e warong mengenai daftar hadir KPM yang bertransaksi per bulan;</p> <p>6. Hasil konfirmasi kepada KPM yang diuji sampling.</p>	<p>1. analisa dokumen;</p> <p>2. analisa data perbankan atas hambatan penyaluran bansos, antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - hambatan distribusi KKS; - hambatan top up ke rekening KPM; - hambatan KPM bertransaksi; <p>2. hasil konfirmasi melalui uji simple random sampling pada KPM dan e warong;</p> <p>3. Informasi tambahan dari berita dan video mengenai hambatan2 pemanfaatan bansos di lapangan;</p> <p>4. Informasi tambahan hasil susenas BPS atas manfaat penyaluran bansos pada lokus kab/kota yang ditetapkan</p>	<p>1. analisa perbandingan dari data perbankan atas KPM yang bertransaksi;</p> <p>2. analisis deskriptif</p>	<p>1. luasnya cakupan penerima bantuan;</p> <p>2. kendala mendapatkan data perbankan atas penyaluran dan pemanfaatan bansos</p>	<p>melibatkan perwakilan</p>	<p>1. KPM sesuai data bayar telah menerima dan memanfaatkan bantuan sosial sembako secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas;</p> <p>2. efektivitas program cukup memadai</p>
3	Rekomendasi untuk mendorong peningkatan efektivitas Kartu Sembako	<p>1. Apakah program bantuan sosial kartu sembako pada program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem telah memiliki tujuan, manfaat dan indikator program?</p> <p>2. Apakah telah ditindaklanjuti/upaya atas permasalahan hambatan penyaluran dan pemanfaatan bansos oleh Kemsos, kemenko PMK, Himbara/PT Pos, dan Dinsos;</p>	<p>1. Inpres Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem;</p> <p>2. Juknis program penurunan kemiskinan ekstrem;</p> <p>3. Perdirjen PFM tahun 2021/ Pedoman umum kartu sembako tahun 2021;</p> <p>4. PKS dengan Himbara dan</p>	<p>1. simpulan hasil analisa hambatan penyaluran dan pemanfaatan</p> <p>2. hasil mediasi melalui perwakilan, himbara dan dinsos untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran dan pemanfaatan bansos sembako pada kab/kota program penurunan kemiskinan ekstrem</p> <p>3. data dukung lapangan terkait efektivitas bansos dalam penurunan kemiskinan ekstrem</p>	<p>1. Reviu dokumen</p> <p>2. Analisis data perbankan penyaluran dan pemanfaatan Hambatan Kebermanfaatan Kartu Sembako</p>	<p>1. analisis deskriptif pemanfaatan bansos dikaitkan dengan tujuan program</p> <p>2. analisa deskriptif data kpm yang memanfaatkan bansos melalui e warong dan hasil susenas PBS;</p>	<p>Data himbara atas pemanfaatan bansos melalui e warong dan ketersediaan data e warong atas bahan pangan yang dibeli KPM tidak lengkap;</p>	<p>1. koordinasi dengan AN untuk mendapatkan data perbankan secara realtime;</p> <p>2. koordinasi dengan D101 untuk segera mendapatkan akses ke BPS atas hasil susenas 2022, apakah bansos sembako signifikan dalam penurunan beban pengeluaran terkait program kemiskinan</p>	<p>efektivitas bantuan yang diterima KPM telah memadai</p>

Secara garis besar kegiatan analisis data ini akan menjawab informasi terkait gambaran kebermanfaatan kartu sembako dalam mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan perkiraan hasil adalah penyimpulan berdasar kuesioner secara uji petik tentang pemanfaatan bansos sembako.

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

A. KEGIATAN ANALISIS DATA

Analisis data yang dilakukan adalah untuk menjawab informasi APP pada Tema Penurunan beban pengeluaran, yaitu gambaran kebermanfaatan kartu sembako dalam mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan perkiraan hasil adalah penyimpulan berdasar kuesioner secara uji petik tentang pemanfaatan bansos sembako.

Kegiatan analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan hasil kuesioner KPM penerima bantuan sosial sembako sebanyak 30 orang dari jumlah populasi 7.534 KPM di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Minimnya jumlah uji petik dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Adapun ringkasan hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.	Nama KPM	Jumlah Anggota Keluarga	Pekerjaan	KODE	Penghasilan per Orang	Pengeluaran		
						Sebelum	Sesudah	Pengurangan
1	RAMADHANI RAUF	4	Pedagang	1	Rp 625.000	3,80	2,00	1,80
2	IRWANSYAH	6	Buruh Pelabuhan	4	Rp 266.667	3,90	2,00	1,90
3	ELISABETH KEWA	4	Buruh Pabrik	4	Rp 1.050.000	4,80	3,00	1,80
4	AGUS RAMLANSYAH	3	Pekerjaan Serabutan	6	Rp 333.333	3,30	1,50	1,80
5	SYAFRIAH PUSPITA RULL	4	Wiraswasta (Selain Berdagang)	5	Rp 500.000	4,70	2,70	2,00
6	SAENAL	1	Supir Truk	5	Rp 1.200.000	2,30	0,60	1,70
7	NANA RUKAMANA	4	Pekerjaan Serabutan	6	Rp 250.000	4,10	2,20	1,90
8	FITRIYAH HANDAYANI	5	Buruh Pelabuhan	4	Rp 260.000	4,10	2,20	1,90
9	SITI ARBAINAH	4	Pedagang	1	Rp 450.000	4,10	1,20	2,90
10	INDAH GEMALAWATI	4	Buruh Bangunan	4	Rp 625.000	4,80	2,30	2,50
11	BAHTIAR RIVALI	5	Honorar Satpol PP	5	Rp 550.000	5,20	2,70	2,50
12	HASNA	4	Wiraswasta (Selain Berdagang)	5	Rp 625.000	4,70	2,80	1,90
13	HENI KUSMAWATI	2	Wiraswasta (Selain Berdagang)	5	Rp 1.500.000	3,40	1,50	1,90
14	IRWANSYAH	4	Wiraswasta (Selain Berdagang)	5	Rp 375.000	4,10	2,10	2,00
15	NURUR ROHMAH	4	Wiraswasta (Selain Berdagang)	5	Rp 375.000	5,00	3,00	2,00
16	BEDDU	4	Nelayan	2	Rp 375.000	4,10	0,60	3,50
17	NUR ASIAH	6	Petani Rumpuk Laut	3	Rp 500.000	4,95	3,15	1,80
18	RASDIANA	2	Pekerjaan Serabutan	6	Rp 600.000	2,90	0,60	2,30
19	LIA	3	Pekerjaan Serabutan	6	Rp 500.000	3,80	1,80	2,00
20	ANDI AMIN	4	Nelayan	2	Rp 500.000	4,95	2,40	2,55
21	AGUS SUTRISNO	5	Pekerjaan Serabutan	6	Rp 200.000	4,10	1,80	2,30
22	ASRUL	5	Nelayan	2	Rp 400.000	4,70	2,90	1,80
23	LATIFAH	5	Crew Speedboat	5	Rp 300.000	4,10	2,30	1,80
24	MUHIDIN ARDIANTO	4	Pekerjaan Serabutan	6	Rp 500.000	4,90	2,30	2,60
25	NURUL HIDAYAH	2	Supir Travel	5	Rp 600.000	2,90	0,90	2,00
26	SITI ASIAH	4	Wiraswasta (Selain Berdagang)	5	Rp 625.000	4,90	2,30	2,60
27	SUTRIANI	5	Pedagang	1	Rp 600.000	4,95	3,00	1,95
28	RAHUL SUCIPTO	1	Pekerjaan Serabutan	6	Rp 500.000	2,90	0,90	2,00
29	JUMADI	4	Penjaga Sekolah	4	Rp 625.000	5,00	3,00	2,00
30	TAMRIN	7	Nelayan	2	Rp 500.000	5,80	2,90	2,90

*Jumlah rupiah dalam ratusan ribu (100.000)

Pekerjaan	Kode
Pedagang	1
Nelayan	2
Petani	3
Buruh	4
Wiraswasta	5
Serabutan	6

B. URAIAN ANALISIS DATA DAN HASILNYA

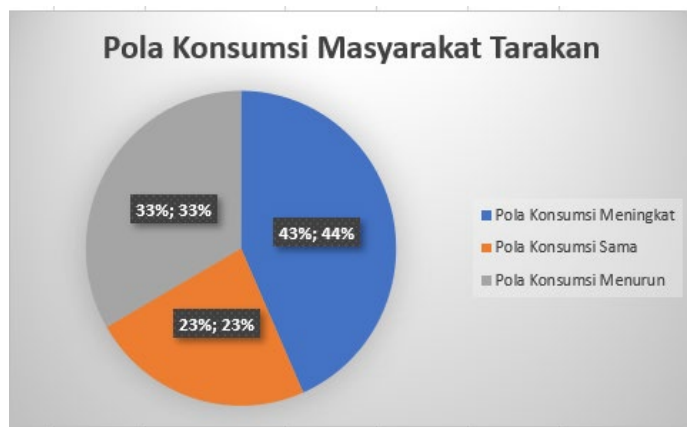
1. Descriptive Statistic

Jumlah Anggota Keluarga		Penghasilan per Orang		Pekerjaan	
Mean	4,0	Mean	543667	Mean	4
Standard Error	0,251356473	Standard Error	50714,6501	Standard Error	0,304752
Median	4	Median	500000	Median	5
Mode	4	Mode	500000	Mode	5
Standard Deviation	1,376736104	Standard Deviation	277775,5785	Standard Deviation	1,669193
Sample Variance	1,895402299	Sample Variance	77159272031	Sample Variance	2,786207
Kurtosis	0,526525991	Kurtosis	4,715228072	Kurtosis	-0,67106
Skewness	-0,361069784	Skewness	1,961448102	Skewness	-0,76835
Range	6	Range	1300000	Range	5
Minimum	1	Minimum	200000	Minimum	1
Maximum	7	Maximum	1500000	Maximum	6
Sum	119	Sum	16310000	Sum	126
Count	30	Count	30	Count	30
Confidence Level(95,0%)	0,51408171	Confidence Level(95,0%)	103723,1057	Confidence Level(95,0%)	0,623287

Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat kota Tarakan yang tergolong miskin memiliki rata rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang dengan kriteria lain yang menjadi indikator masyarakat miskin kota tarakan adalah masyarakat dengan profesi buruh atau masyarakat dengan penghasilan rata rata anggota keluarga di angka Rp 543.667. Jadi apabila ada keluarga dengan jumlah anggota keluarga 4 dengan penghasilan Rp 543.667/ kepala bisa dipastikan miskin dan layak menerima bantuan sosial sembako.

2. Analisis Deskriptif atas kebermanfaatan bantuan sosial dalam menurunkan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Analisis			
Sebelum	Sesudah	Pengurangan	Keterangan
Rp 380.000	Rp 200.000	Rp 180.000	Meningkat
Rp 390.000	Rp 200.000	Rp 190.000	Meningkat
Rp 480.000	Rp 300.000	Rp 180.000	Meningkat
Rp 330.000	Rp 150.000	Rp 180.000	Meningkat
Rp 470.000	Rp 270.000	Rp 200.000	Sebanding
Rp 230.000	Rp 60.000	Rp 170.000	Meningkat
Rp 410.000	Rp 220.000	Rp 190.000	Meningkat
Rp 410.000	Rp 220.000	Rp 190.000	Meningkat
Rp 410.000	Rp 120.000	Rp 290.000	Menurun
Rp 480.000	Rp 230.000	Rp 250.000	Menurun
Rp 520.000	Rp 270.000	Rp 250.000	Menurun
Rp 470.000	Rp 280.000	Rp 190.000	Meningkat
Rp 340.000	Rp 150.000	Rp 190.000	Meningkat
Rp 410.000	Rp 210.000	Rp 200.000	Sebanding
Rp 500.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Sebanding
Rp 410.000	Rp 60.000	Rp 350.000	Menurun
Rp 495.000	Rp 315.000	Rp 180.000	Meningkat
Rp 290.000	Rp 60.000	Rp 230.000	Menurun
Rp 380.000	Rp 180.000	Rp 200.000	Sebanding
Rp 495.000	Rp 240.000	Rp 255.000	Menurun
Rp 410.000	Rp 180.000	Rp 230.000	Menurun
Rp 470.000	Rp 290.000	Rp 180.000	Meningkat
Rp 410.000	Rp 230.000	Rp 180.000	Meningkat
Rp 490.000	Rp 230.000	Rp 260.000	Menurun
Rp 290.000	Rp 90.000	Rp 200.000	Sebanding
Rp 490.000	Rp 230.000	Rp 260.000	Menurun
Rp 495.000	Rp 300.000	Rp 195.000	Meningkat
Rp 290.000	Rp 90.000	Rp 200.000	Sebanding
Rp 500.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Sebanding
Rp 580.000	Rp 290.000	Rp 290.000	Menurun



Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial menurunkan beban pengeluaran Masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hal itu terlihat dari jumlah pengeluaran bulanan sebelum dan sesudah yang mengalami penurunan. Namun ada 3 pola penurunan konsumsi masyarakat kota tarakan:

1. 43% penerima bansos meningkatkan standar pangan mereka;
2. 23% penerima bansos menerpakan standar biaya pangan yang konstan;
3. 33% penerima bansos menurunkan standar biaya pangan mereka.

3. Analisis Regresi Pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap penurunan beban pengeluaran konsumsi rumah tangga.

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,215320352
R Square	0,046362854
Adjusted R Square	-0,024276934
Standard Error	0,430601523
Observations	30

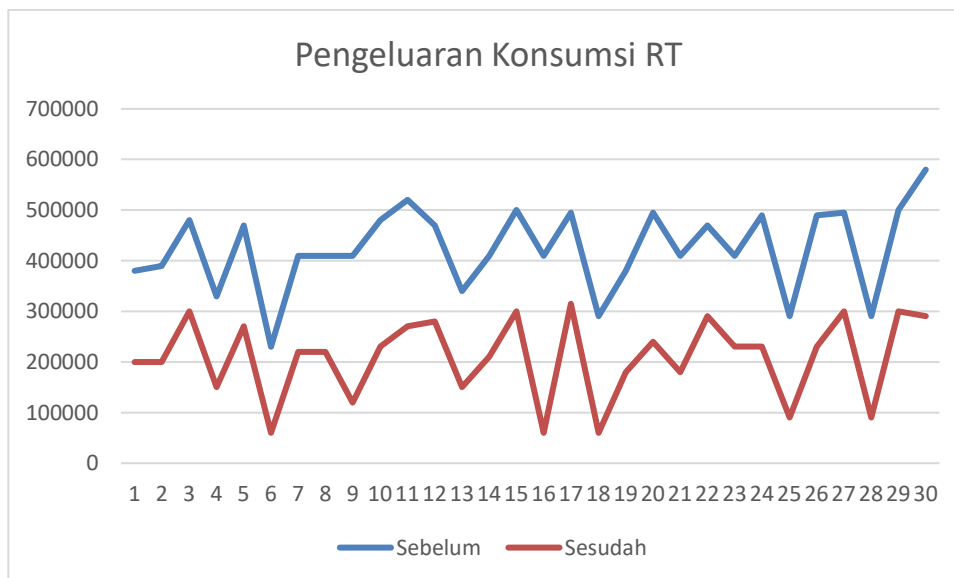
ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	0,24338953	0,121695	0,656328	0,526832611
Residual	27	5,006277136	0,185418		
Total	29	5,249666667			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	2,093344552	0,393788957	5,315905	1,3E-05	1,285356354	2,901333	1,285356354	2,901332751
Jumlah Anggota Keluarga	0,040170355	0,066673546	0,602493	0,551873	-0,096632462	0,176973	-0,096632462	0,176973172
Penghasilan per Orang	-1,82747E-07	3,30453E-07	-0,55302	0,5848	-8,60782E-07	4,95E-07	-8,60782E-07	4,95287E-07

Berdasarkan hasil diatas diperoleh informasi bahwa variabel jumlah anggota keluarga dan penghasilan rumah tangga per kepala berpengaruh 4% terhadap penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Significance F >0,05 berarti berpengaruh tidak signifikan. Nilai koefisien positif pada jumlah anggota keluarga mengartikan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sedangkan nilai koefisien penghasilan per orang bernilai negatif artinya penghasilan per orang berpengaruh negatif terhadap penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

BAB III PENUTUP

Secara keseluruhan program bansos sembako yang diberikan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan. Hal tersebut tergambar pada diagram di bawah ini:



Berdasarkan chart diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya bantuan sosial sembako memberikan manfaat langsung dalam mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat miskin di Kota Tarakan. Sehingga hal ini telah memberikan gambaran kebermanfaatan kartu sembako dalam mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah tangga.